



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

RENCANA KERJA [RENJA]

TAHUN 2023



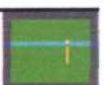
**No Cash...!
Go Digital..**





DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	56
3.3. Program dan Kegiatan.....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP.....	71
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja Utama dan Kinerja Program Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.....	19
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Selatan.....	21
Tabel 2.3. Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	34
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan.....	40
Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran BPKPAD.....	57
Tabel 4.6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan	62





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan Misi keempat (ke-IV) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Merupakan Misi yang Diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	4
-------------	--	---





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya manusia. Untuk menyelenggarakan pembangunan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dalam rangka keseimbangan kemajuan antar daerah maka perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan demikian sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerahnya baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya.

Amanah otonomi daerah dimaksud disamping merupakan kesempatan bagi daerah untuk dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien sekaligus menjadi tantangan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan efisien serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan ke masyarakat.

Untuk lebih mensinkronkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan antar Pelaku Pembangunan dan antar Fungsi Pemerintahan agar terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan maka di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) dan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman pada peraturan ini bahwa tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur pada Pasal 125 pada Pasal 125 sampai Pasal 143 dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan Renja-PD, Penyusunan Ranwal Renja-PD, Penyusunan Rancangan Renja-PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD dan Penetapan Renja-PD.

Setelah melalui tahapan-tahapan penyusunan maka tahap selanjutnya adalah tahapan Penyusunan perumusan rancangan akhir renja yang menjadi Rencana Kerja final Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah Dokumen Perencanaan atas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD mulai dari persiapan penyusunan Renja-PD, Penyusunan Ranwal Renja-PD, Penyusunan Rancangan Renja-PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD dan Penetapan Renja-PD harus berpedoman kepada



Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) OPD sehingga harus melalui tahapan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD, capaian sasaran indikator kinerja, pertimbangan kemampuan ketersediaan pendanaan serta kajian dan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penyusunan rencana program dan kegiatan yang dibutuhkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, setelah tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka selanjutnya dilakukan lagi pembahasan melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi serta capaian sasaran indikator kinerja yang telah dihasilkan maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dengan tetap mengacu kepada upaya-upaya percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV (keempat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni:

"Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya"

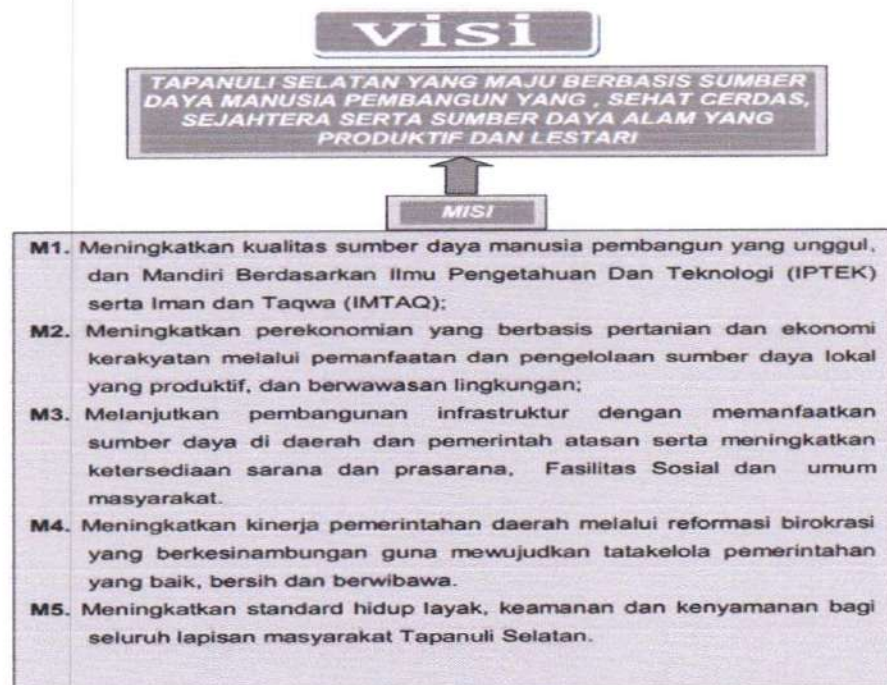
Sedangkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV (keempat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

"Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari"

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Berikut keterkaitan antara rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1. Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan



Misi keempat (ke-IV) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan misi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

"Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa"

Untuk menjalankan misi tersebut maka harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja, serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan harus memfokuskan program dan kegiatannya dalam tatakelola keuangan, peningkatan pendapatan dan tatakelola aset daerah yang akuntabel, transparan, adil dan maju yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, berkesinambungan berlandaskan agama dan adat budaya guna mencapai visi dan misi kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259);
22. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;



36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);



42. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
43. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
44. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
45. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
46. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
47. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
48. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
49. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1022);
50. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1128).



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai tahap untuk memuat pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sekaligus sebagai alat ukur penilaian dan evaluasi tentang capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 ini selain untuk tahapan agar terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan terpadu penyusunan perencanaan pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar Fungsi Pemerintahan, antar Pelaku Pembangunan maupun antar Daerah dan secara khusus juga bertujuan agar lebih optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan tanggap terhadap perubahan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka terwujudnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas pokoknya maka Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 9) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 11) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 13) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 14) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 15) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 16) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 17) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 18) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 19) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 20) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 21) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Sub Kegiatan :

- 22) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 23) Pengadaan Mebel
- 24) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 25) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 26) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 27) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 28) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 29) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 31) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 32) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 33) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- 8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- 34) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 35) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 36) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 37) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD



- 38) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 39) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 40) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 41) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- 42) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Kegiatan :

- 9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

- 43) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 44) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 45) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 46) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- 10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- 47) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 48) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 49) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 50) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota



Kegiatan :

11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- 51) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 52) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 53) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- 54) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 55) Inventarisasi Barang Milik Daerah

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan

13. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- 56) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 57) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukakn dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BPKPAD sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1.

Pengukuran Kinerja Utama dan Kinerja Program Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Sasaran Strategi	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Nilai Peringkat Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4			5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	1	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	97,90	97,60	99,69	Sangat Tinggi
Meningkatnya pendapatan pajak daerah	2	Nilai pajak daerah (Rp)	30.621.137.350	34.343.113.055	112,15	Sangat Tinggi
Jumlah 1 dan 2 :					211,84 %	
Rata-Rata Capaian :					105,92%	Sangat Tinggi
Penjelasan:						
Penjelasan No 1						
25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) x 100						
$= (25\% (100\%) + 25\% (93,91\%) + 25\% (100\%) + 25\% (96,53\%)) \times 100 = 25\% + 23,47\% + 25\% + 24,13\% = 97,60\%$						
25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran =		Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P.APD (1) + Dokumen Perbup P.APD (1)				
Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran di kali 100		$= \frac{\text{Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P. APBD (1) + Dokumen Perbup P.APD (1)}}{\text{Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P. APBD (1) + Dokumen Perbup P.APD (1)}} \times 100 = 100\%$				
25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer =		$= \frac{1.297.150.101.430}{1.381.228.244.753} \times 100 = 93,91\%$				
Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi Perencanaan Belanja Daerah dikali 100						
25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD =		$= \frac{45 \text{ OPD}}{45 \text{ OPD}} \times 100 = 100\%$				
Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100						
25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset =		$= \frac{236.974.942.898}{245.491.805.761} = 96,53\%$				
Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100						
Penjelasan No 2						
Jumlah pajak daerah di tahun 2021						

Total anggaran belanja untuk mendukung semua kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah adalah sebesar Rp. 303.335.346.423 dari total belanja tersebut terdiri dari anggaran Belanja Operasi Rp. 28.174.342.226; Belanja Modal Rp. 376.912.598; Belanja tak terduga Rp. 23.487.628.599 dan Belanja Transfer Rp. 251.296.463.000. Selama Tahun Anggaran 2021, BPKPAD telah dapat mempertanggungjawabkan bagian Belanja Operasi Rp. 26.509.110.489; Belanja Modal Rp. 368.933.000; Belanja Tak



Terduga Rp. 22.610.843.206 dan Belanja Transfer Rp. 244.696.044.850. Dari Anggaran Rp. 303.335.346.423 terealisasi sebesar Rp. 294.184.931.545 dengan persentase mencapai 96,98%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam table berikut ini :



Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	100,00	52,82	52,82
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	23,00	23,00
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	15		3	3	100	3	1	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	5		1	1	100	1	1	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (laporan)	15		3	3	100	3	2	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (laporan)	4		0	0	0	1	0	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	51,00	51,00
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Pembayaran Gaji ASN (laporan)	70		14	14	100	14	10	
						Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN (laporan)	60		12	12	100	12	5	
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Honorarium PNS/ASN yang Terbayar (OB)	720		170	114	67	144	60	
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Jumlah SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SKPD yang Tersusun (laporan)	60		12	12	100	12	4	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (dokumen)	5		1	1	100	1	1	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,00	67,28	67,28
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas (orang)	450		49	88	180	90	88	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	50		23	2	9	10	3	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81	99,81
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	5	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	12	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	8	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	4	
					Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia (kotak)	1.250		250	160	64	250	0	
					Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	6	
					Jumlah Snack Rapat yang Tersedia (kotak)	500		100	100	100	100	0	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Barang Cetak Blanko, Karcis, Formulir sebagai Media Bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta Berbagai Cetak Pelengkap Administrasi Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	8	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Pembayaran Surat Kabar kabar yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	2	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	100		20	20	100	20	3	
					Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	555		111	111	100	111	55	
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Operasional Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tersedia (aplikasi)	40		8	8	100	8	3	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	47,48	47,48
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang Diadakan (unit/persen)	400		0	0	0	100	100	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang Diadakan (unit)	2		0	0	0	1	0	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel				Jumlah Mebeulair Kantor yang Terpenuhi (bulan)	60		0	0	0	12	3	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	0		0	0	0	12	0	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12		2	2	100	12	0	
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	12		0	0	0	12	0	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	100,00	43,55	43,55
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Pembayaran Materai yang Tersedia (buah)	2.000		493	296	60	400	296	
					Jumlah Pembayaran Pengiriman Surat/Barang yang Tersedia (Kg)	500		100	18	18	100	0	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	5	
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja yang Terpenuhi (bulan)	60		0	0	0	12	0	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Gaji Tenaga Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Penjaga Kantor yang Tersedia (OB)	650		130	130	100	130	65	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	109,00	109,00	100,00	67,15	67,15
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan/unit)	60		0	0	0	12	6	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia (unit)	20		0	0	0	4	2	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan)	60		12	12	100	12	3	
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia (unit)	5		4	4	100	1	0	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kerja yang Terpelihara (bulan)	60		12	12	100	12	1	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpeliharaan (bulan)	60		12	12	100	12	3	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,74	16,74
						Rasio Realisasi Belanja Daerah Terhadap Perencanaan Belanja Daerah	94,50	94,43	94,44	94,44	100,00	94,45	16,74	17,71
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33,96	33,96
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA yang Tersusun (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
						Jumlah PPAS yang Tersusun (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA yang Tersusun (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
						Jumlah Perubahan PPAS yang Tersusun (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	235		47	45	96	47	0	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	235		47	45	96	47	0	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				Jumlah DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	235		47	45	96	47	47	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				Jumlah Perubahan DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	235		47	45	96	47	0	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang APBD (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
					Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Perbub tentang Perubahan Perbub Penjabaran APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Perda tentang APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Ranperbub tentang Penjabaran APBD (dokumen)	15		0	0	0	3	0	
					Jumlah Ranperda tentang APBD (dokumen)	15		0	0	0	3	0	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen)	5		0	0	0	1	0	
					Jumlah Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Perbub tentang Perubahan Perbub Penjabaran P.APD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Perda tentang Perubahan APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Ranperbub tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	15		0	0	0	3	0	
					Jumlah Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen)	15		0	0	0	3	0	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Jumlah OPD yang Diberikan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD (OPD)	225		135	100	74	45	0	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	20	3	3	100	4	0	
					Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	225		45	45	100	45	0	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	50	10	10	100	10	10	
					Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	225		45	45	100	45	45	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,39	30,39
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pungsional SKPD (OPD)	225	45	45	100	45	0	
					Jumlah Pengajuan SP2D Bantuan (berkas)	5		1	1	100	1	0	
					Jumlah Pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (OPD)	225		45	45	100	45	0	
					Jumlah Pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (OPD)	225		45	45	100	45	0	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	60	12	12	100	12	5	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Buku Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Bulanan (laporan)	60	12	12	100	12	4	
					Jumlah Daftar Register Penerimaan/ Pengeluaran Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	4	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Penguji Pembayaran Gaji se Kab.Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Gaji ke 13 se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Gaji Susulan se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Gaji Terusan se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Setoran Kelebihan Pembayaran Gaji (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran SP2D Gaji per OPD (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Pembayaran Tunjangan Hari Raya se Kab. Tapsel (daftar)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (daftar)	5		1	1	100	1	0	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,35	45,35
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	0	
						Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Semesteran (laporan)	10		2	2	100	2	0	
						Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan (laporan)	20		4	4	100	4	0	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5	02	02	2.02	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	5		1	1	100	1	0	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota/Kabupaten (orang)	445		91	91	100	91	0	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,61	16,61
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan PILKADES Tahun 2022 (Tahun)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	3	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	0	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	0	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah	83,24	83,15	83,16	83,16	100,00	83,18	12,93	15,53
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedia Laporan dan Daftar Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12,93	12,93
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (laporan)	30		6	6	100	6	1	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah (dokumen)	25		5	5	100	5	1	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD	99,00	97,00	97,00	96,90	99,90	97,00	10,05	10,15
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,05	10,05
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Piutang PAD (Laporan)	10		2	2	100	2	0	
						Jumlah Penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD terhadap Target PAD (berkas)	55		11	11	100	11	0	
						Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bulanan (laporan)	60		12	12	100	12	0	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Daftar Harga Zona Nilai Tanah per wilayah Kecamatan (Laporan)	75		15	15	100	15	0	
						Jumlah Daftar NJOP PBB (Buku)	5		1	1	100	1	0	
						Jumlah Hasil Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (laporan)	5		1	1	100	1	0	

Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program kegiatan :

1. Adanya covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan OPD yang tidak terlaksana sepenuhnya;
2. Pengimputan harga di system SIPD lebih tinggi dengan harga SSH sehingga banyak kelebihan anggaran belanja modal.

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Penyesuaian SIPD dengan harga SSH;
2. Memaksimalkan pelaksanaan Program dan Kegiatan seluruh OPD;
3. Memonitoring dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan penyerapan anggaran;
4. Melakukan inovasi-inovasi terhadap pengelolaan keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang pendapatan, dan penatausahaan keuangan daerah (penganggaran, belanja, pelaporan dan aset) yang diwujudkan dalam sebuah motto ataupun tagline **"No Cash, Go Digital"** dimana tagline ini merupakan ruh dasar dalam membangun semangat berpikir, bekerja dan melayani. Motto ini secara nyata telah memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak kualitas kinerja pada Organisasi ini dapat dilihat dari produk-produk unggulan pelayanan yang membantu para pengguna layanan sehingga seluruh layanan yang dulunya konvensional secara perlahan telah beralih ke transaksi digital. Hal ini juga sejalan dengan "Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai (GNNT)" dimana gerakan ini juga diwujudkan nyatakan dalam program "Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)".

Berikut ini ringkasan kegiatan Elektronifikasi yang merupakan perwujudan dari Motto **"No Cash Go Digital"** dari awal usaha sampai dengan sekarang :

1. Elektronifikasi Belanja



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memulai usaha elektronifikasi transaksi berawal dari Tahun 2015 dimana pada saat itu seluruh transaksi pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SP2D-LS seluruhnya dibayarkan secara nontunai secara *Host to Host* (H2H) melalui Aplikasi Keuangan milik Pemda Tapanuli Selatan yang terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS) milik PT. Bank SUMUT secara realtime. Usaha elektronifikasi belanja ini terus berlanjut sehingga pada tahun 2019 di perluas layanannya ke tingkat Transaksi SKPD dengan menggunakan Aplikasi CMS-OPD (*Cash Managemenst System Organisasi Perangkat Daerah*) yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran SKPD untuk bertransaksi secara elektronik meninggalkan pola transaksi konvensional sebelumnya sehingga sampai saat ini seluruh transaksi belanja SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dilakukan secara non tunai (100%).

2. Elektronifikasi Penerimaan

Perjalanan usaha untuk elektronifikasi penerimaan berawal dari Tahun 2016 dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pertama kali berhasil mengintegrasikan kanal pembayaran elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2) secara *Host-to-Host* (H2H) dengan PT. Bank SUMUT. Kegiatan elektronifikasi ini dilanjutkan dengan perluasan layanan ke Pajak dan Retribusi Daerah yang mulai diimplementasikan mulai tahun 2019 pada bulan september dan sampai saat ini seluruh Pajak dan Retribsusi Daerah dapat dibayarkan melalui kanal elektronik, ATM, SMS Banking, beberapa E-Commerce, Dompot Digital dan Alfamart/Alfamidi. Kedepannya kanal QRIS sedang menunggu status perizinan QRIS Dinamis oleh Bank SUMUT dan untuk elektronifikasi Pajak dan Retribusi daerah di Tapanuli Selatan sendiri sudah mencapai 100% hanya menunggu Kanal QRIS agar Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke kategori digital dalam penilaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkat dan menunjukkan prestasi, hal ini dapat dilihat dari **Tahun 2014-2020 adalah tercapainya**



Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan opini penilaian tertinggi yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012-2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun 2011 mendapat opini Disclaimer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda Terbaik dalam Kemandirian Fiskal Tahun 2018, Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun. Tahun 2022 mendapat penghargaan atas Capaian Opini WTP 8 (delapan) kali berturut turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 s/d 2021. Dengan tercapainya opini WTP Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Sesuai tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintahan yaitu urusan keuangan. Pada Tahun 2021 BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Untuk indikator kinerja utama meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah realisasinya 97,60 % dari target 97,90 % dengan capaian 99,69 % sedangkan untuk indikator nilai pajak daerah terealisasi Rp. 34.343.113.055 dari target Rp. 30.621.137.350 dengan capaian 112,15 %. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2021 sebesar Rp. 294.184.931.545 dari rencana belanja pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 303.335.346.423.

Adapun capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.3.
Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi					Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Indikator Kinerja Kunci (IKK)															
1.	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
B	Indikator Kinerja SKPD															
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	94,41	94,42	94,43	94,43	94,44	94,44	99,69		94,42	94,43	94,43	94,44	94,44	
2.	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD	%	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00	99,00	112,15		97,89	98,21	98,98	99,00	99,00	
C	Indikator Kinerja Program															
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	95		100	100	100	100	100	
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Rasio Realisasi Belanja Daerah Terhadap Perencanaan Belanja Daerah	%	94,45	94,47	94,48	94,49	94,50	94,50	93,91		94,47	94,48	94,49	94,50	94,50	
	Rasio Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Target Alokasi	%	87,22	87,41	87,97	88,55	88,95	88,95	100		87,41	87,97	88,55	88,95	88,95	
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3.	Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah	%	83,18	83,20	83,21	83,22	83,24	83,24	96,53		83,20	83,21	83,22	83,24	83,24	



No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi					Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD	%	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00	99,00	75		97,89	98,21	98,98	99,00	99,00	
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, struktur anggarannya terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan bagian pembiayaan. Bagian pendapatan meliputi sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bagian belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sedangkan bagian pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang cepat berubah, sehingga dasar hukum pemungutan atau perda/ perbup yang berkaitan dengan



- pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
2. Koordinasi antar instansi terkait pemungutan pendapatan asli daerah masih belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan;
 3. Belum terdapat SDM yang memiliki keahlian sebagai Penilai PBB P2 dan Pemeriksa Pajak pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 4. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/ pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku;
 5. Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan;
 6. Informasi atas perubahan aset (fisik dan nilai) yang berpengaruh ke laporan keuangan yang tidak terkonfirmasi ke pengelola barang;
 7. Masih adanya anggapan yang menganggap penatausahaan BMD (Barang Milik Daerah) belum menjadi perhatian.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah (RPJMD)

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah "Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya manusia pembangunan yang sehat, cerdas, sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BPKPAD terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa".

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.



d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Penempatan Pegawai harus mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
2. Sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah lebih tertata dengan berbasis akrual;
3. Pengembangan teknologi yang sangat cepat;
4. Pertanggungjawaban aparat terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

Peluang

1. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Aparatur;
 2. Tersedianya pejabat struktural tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 3. Menerbitkan NOP (Nomor Objek Pajak) pada setiap objek pajak;
 4. Adanya lembaga penyelenggara diklat teknis tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 5. Dapat merekrut ASN non PNS yang berkemampuan untuk membantu PNS dalam melaksanakan tugas sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran;
 6. Mengaktifkan LP2P untuk PNS/melampirkan tanda lunas pajak.
- e. Formulasi Isu-isu Penting dalam Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah :
1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 2. Meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menambah sumber pendapatan;
 3. Meningkatkan sistem informasi dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 4. Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.4. **Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Muatan RKPD :

- Rancangan kerangka peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- Program prioritas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Nilai Strategis RKPD :

- Merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD;
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD;
- Memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS;
- Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab OPD.

Prioritas dan Sasaran dalam Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta kerangka pendanaan;
- Prioritas peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana;



- Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

Kriteria Penentuan Prioritas dan Sasaran Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran OPD, seperti peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan sesuai standar dan pengelolaan dan pendataan aset daerah;
- Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
- Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Rencana Program Dan Kegiatan dalam Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;
- Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Penjabaran dari rencana kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				289.190.199.011					289.190.199.011	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		27.368.261.588	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		27.368.261.588	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah %	100	258.251.520	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah %	100	258.251.520	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	3	108.297.920	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	3	108.297.920	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	30.693.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	30.693.700	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	22.538.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	22.538.100	
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	21.761.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	21.761.500	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	18.994.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	18.994.500	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (dokumen)	1	55.965.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (dokumen)	1	55.965.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (laporan)	3		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (laporan)	3		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah %	100	23.595.903.808	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah %	100	23.595.903.808	
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN (bulan)	14	22.742.086.708	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN (bulan)	14	22.742.086.708	
			Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN (bulan)	12				Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN (bulan)	12		
8)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup SKPD	Jumlah Honorarium PNS/ASN yang Terbayar (OB)	144	738.981.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup SKPD	Jumlah Honorarium PNS/ASN yang Terbayar (OB)	144	738.981.600	
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SKPD yang Tersusun Bulanan (laporan)	12	101.204.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SKPD yang Tersusun Bulanan (laporan)	12	101.204.500	
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	13.631.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (dokumen)	1	13.631.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah %	100	191.064.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah %	100	191.064.600	
11)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup SKPD	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas (orang)	90	73.189.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup SKPD	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas (orang)	90	73.189.600	
12)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	10	117.875.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	10	117.875.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.726.508.040	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.726.508.040	
13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	35.889.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	35.889.600	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	384.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	384.500.000	
15)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup SKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang Terpenuhi (bulan)	12	47.866.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup SKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang Terpenuhi (bulan)	12	47.866.900	
16)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	127.308.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	127.308.900	
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia (kotak)	250				Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia (kotak)	250		
			Jumlah Makanan dan Minum Tamu yang Terpenuhi (bulan)	12				Jumlah Makanan dan Minum Tamu yang Terpenuhi (bulan)	12		
			Jumlah Snack Rapat yang Tersedia (kotak)	100				Jumlah Snack Rapat yang Tersedia (kotak)	100		
17)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lingkup SKPD	Jumlah Barang Cetak Blanko, Karcis, Formulir sebagai Media Bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta Berbagai Cetakan Pelengkap Administrasi Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	12	235.808.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lingkup SKPD	Jumlah Barang Cetak Blanko, Karcis, Formulir sebagai Media Bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta Berbagai Cetakan Pelengkap Administrasi Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	12	235.808.700	
18)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Surat Kabar kabar yang Tersedia (bulan)	12	27.540.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Surat Kabar kabar yang Tersedia (bulan)	12	27.540.000	
19)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	20	292.370.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	20	292.370.000	
			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	111				Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	111		
20)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Operasional Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tersedia (aplikasi)	8	575.223.940	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Operasional Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tersedia (aplikasi)	8	575.223.940	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	79.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	79.000.000	
21)	Pengadaan Mebel	Lingkup SKPD	Jumlah Mebeleur Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	79.000.000	Pengadaan Mebel	Lingkup SKPD	Jumlah Mebeleur Kantor yang Terpenuhi (bulan)	12	79.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.188.516.820	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.188.516.820	
22)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Materai yang Tersedia (buah) Jumlah Pembayaran Pengiriman Surat/Barang yang Tersedia (Kg)	400 100	6.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Materai yang Tersedia (buah) Jumlah Pembayaran Pengiriman Surat/Barang yang Tersedia (Kg)	400 100	6.560.000	
23)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terpenuhi (bulan)	12	693.421.370	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terpenuhi (bulan)	12	693.421.370	
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Gaji Tenaga Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Penjaga Kantor yang Tersedia (OB)	130	488.535.450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup SKPD	Jumlah Gaji Tenaga Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Penjaga Kantor yang Tersedia (OB)	130	488.535.450	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lingkup SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	329.016.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lingkup SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	329.016.800	
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan/unit) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Tersedia (unit)	12 4	53.241.575	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan/unit) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Tersedia (unit)	12 4	53.241.575	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia (unit)	12 1	204.095.225	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lingkup SKPD	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia (unit)	12 1	204.095.225	
27)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup SKPD	Jumlah Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kerja yang Terpelihara (bulan)	12	26.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup SKPD	Jumlah Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kerja yang Terpelihara (bulan)	12	26.680.000	
28)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup SKPD	Jumlah Perbaikan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara (bulan)	12	45.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup SKPD	Jumlah Perbaikan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara (bulan)	12	45.000.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		260.044.040.563	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		260.044.040.563	
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran	100	837.908.560	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran	100	837.908.560	
29)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Lingkup SKPD	Jumlah KUA yang Tersusun (dokumen) Jumlah PPAS yang Tersusun (dokumen)	1 1	88.487.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Lingkup SKPD	Jumlah KUA yang tersusun (dokumen) Jumlah PPAS yang tersusun (dokumen)	1 1	88.487.400	
30)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan KUA yang Tersusun (dokumen) Jumlah Perubahan PPAS yang Tersusun (dokumen)	1 1	75.528.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan KUA yang Tersusun (dokumen) Jumlah Perubahan PPAS yang Tersusun (dokumen)	1 1	75.528.900	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	26.729.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	26.729.600	
32)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	19.888.700	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	19.888.700	
33)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	46.550.400	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	46.550.400	
34)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	27.385.100	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Lingkup SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	47	27.385.100	
35)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Lingkup SKPD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perda tentang APBD (dokumen) Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Ranperda tentang APBD (dokumen)	1 1 1 1 3 3	222.364.140	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Lingkup SKPD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perda tentang APBD (dokumen) Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Ranperda tentang APBD (dokumen)	1 1 1 1 3 3	222.364.140	
36)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Lingkup SKPD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran P.APBD (dokumen) Jumlah Perda tentang Perubahan APBD (dokumen)	1 1 1 1	175.722.320	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Lingkup SKPD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran P.APBD (dokumen) Jumlah Perda tentang Perubahan APBD (dokumen)	1 1 1 1	175.722.320	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	3				Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	3		
			Jumlah Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen)	3				Jumlah Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen)	3		
37)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Lingkup SKPD	Jumlah OPD yang Diberikan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD (OPD)	45	74.534.300	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Lingkup SKPD	Jumlah OPD yang Diberikan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD (OPD)	45	74.534.300	
38)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	4	25.478.700	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	4	25.478.700	
			Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	45				Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	45		
39)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	10	55.239.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	10	55.239.000	
			Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	45				Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)	45		
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	284.966.180	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	284.966.180	
40)	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Fungsional SKPD (OPD)	45	22.276.700	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Fungsional SKPD (OPD)	45	22.276.700	
			Jumlah Pengajuan SP2D Bantuan (berkas)	1				Jumlah Pengajuan SP2D Bantuan (berkas)	1		
			Jumlah Pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (OPD)	45				Jumlah Pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (OPD)	45		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (OPD)	45				Jumlah Pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (OPD)	45		
41)	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	12	35.189.420	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	12	35.189.420	
42)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lingkup SKPD	Jumlah Buku Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Bulanan (laporan)	12	136.897.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lingkup SKPD	Jumlah Buku Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Bulanan (laporan)	12	136.897.440	
			Jumlah Daftar Register Penerimaan/ Pengeluaran Bulanan (laporan)	12				Jumlah Daftar Register Penerimaan/ Pengeluaran Bulanan (laporan)	12		
43)	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Daftar Penguji Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	1	90.602.620	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Daftar Penguji Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	1	90.602.620	
			Jumlah Pembayaran Gaji ke 12 se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Gaji ke 12 se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran Gaji Susulan se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Gaji Susulan se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran Gaji Terusan se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Gaji Terusan se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran Setoran Kelebihan Gaji (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Setoran Kelebihan Gaji (daftar)	1		
			Jumlah Pembayaran SP2D Gaji per OPD (daftar)	1				Jumlah Pembayaran SP2D Gaji per OPD (daftar)	1		



No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pembayaran Tunjangan Hari Raya se Kab. Tapsel (daftar)	1				Jumlah Pembayaran Tunjangan Hari Raya se Kab. Tapsel (daftar)	1		
			Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (daftar)	1				Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (daftar)	1		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	557.510.150	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	557.510.150	
44)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	12	58.638.100	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	12	58.638.100	
			Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Semesteran (laporan)	2				Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Semesteran (laporan)	2		
			Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan (laporan)	4				Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan (laporan)	4		
45)	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)	1	51.223.850	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)	1	51.223.850	
46)	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	188.146.600	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	188.146.600	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota/Kabupaten (orang)	91	259.501.600	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota/Kabupaten (orang)	91	259.501.600	
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	258.363.655.673	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	258.363.655.673	
48)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lingkup SKPD	Bantuan Keuangan PILKADES Tahun 2022 (tahun) Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Bulanan (laporan)	1 12	4.167.624.673	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lingkup SKPD	Bantuan Keuangan PILKADES Tahun 2022 (tahun) Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Bulanan (laporan)	1 12	4.167.624.673	
49)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lingkup SKPD	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak Bulanan (laporan)	12	16.239.750.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lingkup SKPD	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak Bulanan (laporan)	12	16.239.750.000	
50)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Bulanan (laporan)	12	237.956.281.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Bulanan (laporan)	12	237.956.281.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah PP		666.469.680	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah PP		666.469.680	
			Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah					Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah			
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersedia Laporan dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	666.469.680	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersedia Laporan dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	666.469.680	
51)	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (laporan)	6	98.915.100	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (laporan)	6	98.915.100	
52)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah (dokumen)	5	567.554.580	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah (dokumen)	5	567.554.580	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD		1.111.427.180	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD		1.111.427.180	
13	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	1.111.427.180	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	1.111.427.180	
53)	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Piutang PAD (Laporan) Jumlah Penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD Terhadap Target PAD (berkas) Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bulanan (laporan)	2 11 12	462.570.880	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Piutang PAD (Laporan) Jumlah Penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD Terhadap Target PAD (berkas) Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bulanan (laporan)	2 11 12	462.570.880	
54)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Daftar Harga Zona Nilai Tanah per Wilayah Kecamatan (Laporan) Jumlah Daftar NJOP PBB (buku) Jumlah Hasil Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (laporan)	15 1 1	648.856.300	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Daftar Harga Zona Nilai Tanah per Wilayah Kecamatan (Laporan) Jumlah Daftar NJOP PBB (buku) Jumlah Hasil Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (laporan)	15 1 1	648.856.300	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan



kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pelaksanaan pembangunan dan jalannya Pemerintahan mempergunakan pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan adanya pembagian peran dan tanggung jawab sehingga mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang



ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan,
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter),
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha,
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM,
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi,
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi,



7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas,
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Perurunan emisi gas rumah kaca
3. Tingkat pengangguran terbuka
4. Rasio Gini (nilai)
5. Indeks pembangunan manusia
6. Tingkat kemiskinan
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan



5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan public.

Sesuai tugas dan fungsinya BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan

Dalam Upaya mewujudkan misi yang diinginkan maka telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset



Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Misi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada Misi keempat (ke-IV) pada tujuan keempat (ke-4) sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : *"Terwujudnya kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan"*.

Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan tujuan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan misi keempat (ke-IV) RPJMD Tahun 2021-2026 pada sasaran kelima (ke-5) huruf e adalah : *"Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa"*.

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran BPKPAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Transisi 2021	Target Capaian Setiap Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	94,40	94,41	94,42	94,43	94,43	94,44
			Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	96,90	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Tahun 2023 Rp. 289.190.199.011. Keempat Program tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya visi dan misi Kepala Daerah (misi ke-4) yaitu "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa". Rencana kerja BPKPAD Tahun 2023 mencakup 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 54 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 9) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 11) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 12) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 13) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 14) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 16) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 17) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 18) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 20) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 21) Pengadaan Mebel

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 22) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 23) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 25) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan
- 26) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 27) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 28) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- 29) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 30) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 31) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 32) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 33) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 34) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 35) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 36) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 37) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 38) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- 39) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Kegiatan :

9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

- 40) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 41) Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 42) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 43) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



Sub Kegiatan :

- 44) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 45) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 46) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 47) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- 11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- 48) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 49) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 50) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan

- 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- 51) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 52) Inventarisasi Barang Milik Daerah

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan

- 13. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- 53) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 54) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN								
5	02				KEUANGAN				289.190.199.011				296.419.953.986
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			27.368.261.588				30.470.116.223
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah %		100	258.251.520			100	280.833.715
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	3	108.297.920	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		3	120.380.115
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	30.693.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	32.993.700
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	22.538.100	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	23.738.100
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	21.761.500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	23.761.500
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	18.994.500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	19.994.500
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (laporan)	Lingkup SKPD	1 3	55.965.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 3	59.965.800
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah %		100	23.595.903.808			100	26.252.835.708



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN (bulan) Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN (bulan)	Lingkup SKPD	14 12	22.742.086.708	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		14 12	25.342.086.708
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PNS/ASN yang Terbayar (OB)	Lingkup SKPD	144	738.981.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		144	784.713.500
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SKPD yang Tersusun Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	101.204.500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	108.404.500
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	13.631.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	17.631.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah %		100	191.064.600			100	246.864.600
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas (orang)	Lingkup SKPD	90	73.189.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		90	98.989.600
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Lingkup SKPD	10	117.875.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		10	147.875.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah %		100	1.726.508.040			100	1.933.051.640
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	35.889.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	38.889.600
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	384.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	394.500.000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	47.866.900	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	52.981.600
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terpenuhi (bulan) Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia (kotak) Jumlah Makanan dan Minum Tamu yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12 250 12	127.308.900	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 250 12	174.368.400



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Snack Rapat yang Tersedia (kotak)		100				100	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Blanko, Karcis, Formulir sebagai Media Bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta Berbagai Cetakan Pelengkap Administrasi Lainnya yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	235.808.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	295.808.700
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Surat Kabar kabar yang Tersedia (bulan)	Lingkup SKPD	12	27.540.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	29.540.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH) Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	Lingkup SKPD	20 111	292.370.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		20 111	352.370.000
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Operasional Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tersedia (aplikasi)	Lingkup SKPD	8	575.223.940	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		8	594.593.340
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	79.000.000			100	99.000.000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	79.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	99.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	1.188.516.820			100	1.299.513.760
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Materai yang Tersedia (buah) Jumlah Pembayaran Pengiriman Surat/Barang yang Tersedia (Kg)	Lingkup SKPD	400 100	6.560.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		400 100	6.560.000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	693.421.370	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	793.418.310
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Tenaga Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Penjaga Kantor yang Tersedia (OB)	Lingkup SKPD	130	488.535.450	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		130	499.535.450



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lingkup SKPD	100	329.016.800			100	358.016.800
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan/unit)	Lingkup SKPD	12	53.241.575	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	55.241.575
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Tersedia (unit)		4				4	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi (bulan)	Lingkup SKPD	12	204.095.225	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	207.095.225
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia (unit)		1				1	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kerja yang Terpelihara (bulan)	Lingkup SKPD	12	26.680.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	38.680.000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara (bulan)	Lingkup SKPD	12	45.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	57.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran			260.044.040.563				263.995.191.803
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		100	837.908.560			100	941.000.660
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1	88.487.400	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	98.487.400
						Jumlah PPAS yang Tersusun (dokumen)		1				1	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA yang Tersusun (dokumen) Jumlah Perubahan PPAS yang Tersusun (dokumen)	Lingkup SKPD	1 1	75.528.900	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 1	79.528.900
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	Lingkup SKPD	47	26.729.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		47	28.821.700
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	Lingkup SKPD	47	19.888.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		47	19.888.700
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	Lingkup SKPD	47	46.550.400	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		47	49.550.400
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD Terverifikasi (dokumen)	Lingkup SKPD	47	27.385.100	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		47	29.385.100
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Perda tentang APBD (dokumen) Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran APBD (dokumen) Jumlah Ranperda tentang APBD (dokumen)	Lingkup SKPD	1 1 1 1 3 3	222.364.140	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 1 1 1 3 3	272.364.140
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen) Jumlah Perbup tentang Perubahan Perbup Penjabaran P.APD (dokumen) Jumlah Perda tentang Perubahan APBD (dokumen)	Lingkup SKPD	1 1 1 1	175.722.320	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 1 1 1	195.722.320



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)		3				3	
						Jumlah Ranperda tentang Perubahan APBD (dokumen)		3				3	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah OPD yang Diberikan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD (OPD)	Lingkup SKPD	45	74.534.300	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		45	78.534.300
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	Lingkup SKPD	4	25.478.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		4	29.478.700
						Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)		45				45	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Pemerintah Atasan (kunjungan)	Lingkup SKPD	10	55.239.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		10	59.239.000
						Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke Perangkat Daerah (OPD)		45				45	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah %		100	284.966.180			100	340.393.100
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Fungsional SKPD (OPD)	Lingkup SKPD	45	22.276.700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		45	29.572.400
						Jumlah Pengajuan SP2D Bantuan (berkas)		1				1	
						Jumlah Pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (OPD)		45				45	
						Jumlah Pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (OPD)		45				45	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	35.189.420	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	45.189.420
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Buku Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	136.897.440	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	166.897.440



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Daftar Register Penerimaan/ Pengeluaran Bulanan (laporan)		12				12	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Penguji Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)	Lingkup SKPD	1	90.602.620	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	98.733.840
						Jumlah Pembayaran Gaji ke 12 se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Gaji se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Gaji Susulan se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Gaji Terusan se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Setoran Kelebihan Gaji (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran SP2D Gaji per OPD (daftar)		1				1	
						Jumlah Pembayaran Tunjangan Hari Raya se Kab. Tapsel (daftar)		1				1	
						Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (daftar)		1				1	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu %		100	557.510.150			100	587.892.370
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	58.638.100	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	59.638.100
						Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Semesteran (laporan)		2				2	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan (laporan)		4				4	
5	02	02	2.02	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)	Lingkup SKPD	1	51.223.850	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1	55.223.850
5	02	02	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen) Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	Lingkup SKPD	1 1	188.146.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 1	198.146.600
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota/Kabupaten (orang)	Lingkup SKPD	91	259.501.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		91	274.883.820
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	258.363.655.673			100	262.125.905.673
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan PILKADES Tahun 2022 (tahun) Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	1 12	4.167.624.673	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 12	4.169.624.673
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	16.239.750.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	20.000.000.000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	12	237.956.281.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12	237.956.281.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah			666.469.680				697.469.680
						Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah							



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedia Laporan dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah %		100	666.469.680			100	697.469.680
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (laporan)	Lingkup SKPD	6	98.915.100	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		6	99.915.100
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah (dokumen)	Lingkup SKPD	5	567.554.580	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5	597.554.580
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD			1.111.427.180				1.257.176.280
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah %		100	1.111.427.180			100	1.257.176.280
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan Piutang PAD (Laporan) Jumlah Penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD Terhadap Target PAD (berkas) Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bulanan (laporan)	Lingkup SKPD	2 11 12	462.570.880	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 11 12	492.570.880
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Daftar Harga Zona Nilai Tanah per Wilayah Kecamatan (Laporan) Jumlah Daftar NJOP PBB (buku) Jumlah Hasil Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (laporan)	Lingkup SKPD	15 1 1	648.856.300	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		15 1 1	764.605.400



BAB V

PENUTUP

Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, maupun yang bersumber dari APBN, setelah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja-OPD), maka untuk tahap selanjutnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu membuat Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja-OPD). Selanjutnya pada tahap akhir adalah penyusunan Rencana Kerja Akhir.

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas antara Renja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2023 dengan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021-2026 dan dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2023.

Dokumen Renja TA 2023 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyusunan program dan Kegiatan pada pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, setiap unit kerja harus mampu mengakomodir dan menjabarkan dokumen perencanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam bidang kewenangan masing-masing Dinas/Instansi berdasarkan usulan-usulan dari bawah (Bottom Up) dan Bukan dari atas (Top Down).

Kebijakan, Indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan disusun untuk mencapai sasaran pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang terpercaya dan mempunyai kredibilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka **"Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari"**. Hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Dokumen Strategi dan Prioritas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah melalui APBD Tahun 2023 masing-masing unit kerja khususnya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada akhirnya, berhasilnya keseluruhan penatausahaan pengelolaan pendapatan,



keuangan dan aset daerah tergantung pada peran serta aparatur yang ada dan masyarakat serta OPD lain di lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bentuk aktifitas dan kemandirian serta ditunjang oleh sikap mental, dedikasi, tekad dan semangat aparat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan BPKPAD Kaupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan awal kegiatan tahunan dimana setelah melalui forum diskusi akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Tahun 2023 dan seterusnya melalui forum diskusi kembali akan menjadi Rencana Kerja (Renja) final/akhir Tahun 2023 yang selanjutnya setelah melalui penetapan menjadi Renja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan dipedomani dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Dengan tersusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 ini diharapkan semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 2022

Kepala Badan Pengelola, Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

M. FRANANDA, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800723 200312 1 00